



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Yogyakarta terletak di antara 1100 24' 19" - 1100 28' 53" Bujur Timur dan antara 070 49' 26" - 070 15' 24" Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Sleman
Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta *Ditindaklanjuti Kota Yogyakarta

Catatan : Luas Kota Yogyakarta 32,8 km2 sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

III. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Table with 4 columns: No, Indikator Kinerja Makro, Capaian Kinerja Tahun N, Capaian Kinerja Tahun N-1, Perubahan (%). Rows include Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, and Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).

Catatan: *Data BPS tahun 2021 belum rilis
Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022, data diolah

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah.



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021, data diolah

2. Angka Kemiskinan

BPS menetapkan garis kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebesar Rp 556.674,00 perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan baseline untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

di Kota Yogyakarta tahun 2021 diestimasikan sebanyak 34.070 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan dalam kurun waktu 3 tahun sebelum pandemi yaitu tahun 2017-2019, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.

Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2022, realisasi 2021 sebesar 7,69 masih belum melampaui target. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus melakukan berbagai upaya guna menurunkan angka kemiskinan.



Sumber: Bappeda Yogyakarta Tahun 2021, data diolah

3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam penganggur. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan.



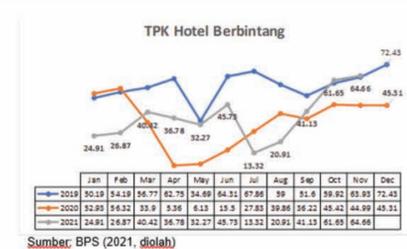
Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022, data diolah

4. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2021 diprediksi akan tumbuh positif. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diestimasikan mencapai 3,70, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta masih lebih tinggi 1,36 poin, namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi DIY yang diprediksi sebesar 5,4, terdapat selisih 0,34poin.



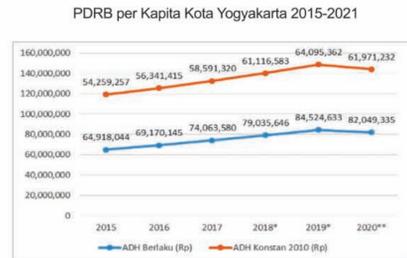
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta yang tumbuh negatif di tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2021 bahkan melebihi target yang ditetapkan di RKPD 2021



Sumber: BPS (2021, diolah)

5. Pendapatan per Kapita

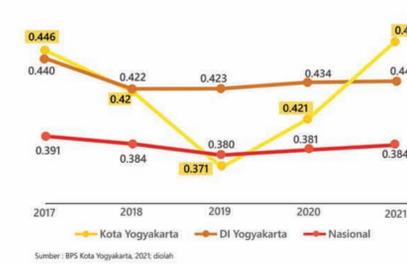
Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2021

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indikator Ketimpangan Pendapatan diukur menggunakan Indeks Gini (Gini Ratio) yaitu sebuah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat dari antar kelompok pendapatan masyarakat, yang nilainya berkisar antara nol (merata sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).



Sumber: BPS Kota Yogyakarta tahun 2022, data diolah

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja pelayanan dasar di Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan mengenai penerapan SPM di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Yogyakarta.

a. Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan terdiri atas: 1. Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Pendidikan Dasar; 3. Pendidikan Kesetaraan. Secara umum, dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan telah terealisasi 100%.



Sosialisasi Jaminan Pendidikan Daerah, Penyerahan Bantuan CSR PT Bank BPD DIY

b. Bidang Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

c. Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum terdiri atas: 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat hari; 2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah. Target Pencapaian bidang pekerjaan umum tahun 2021 adalah 100%. Capaian kinerja pelayanan dasar bidang pekerjaan umum tahun 2021 untuk jenis pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat hari adalah 100% dan capaian kinerja jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah adalah 100%.

d. Bidang Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat terdiri atas: 1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana; 2. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah. Terkait dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, dikarenakan tidak terjadi bencana alam dan relokasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sehingga tidak ada kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

e. Bidang Trantibumlinmas

Jenis pelayanan dasar bidang trantibumlinmas terdiri atas: 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; 2. Pelayanan informasi rawan bencana; 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran.



Kegiatan Pelatihan Saktatkar, Kegiatan Pemadaman, Kegiatan Simulasi Bencana Gempa Bumi, Operasi Non Yudiis Pengungkapan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan BPBD Kota Yogyakarta, 2021

f. Bidang Sosial

Jenis pelayanan dasar bidang trantibumlinmas terdiri atas: 1. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; 2. Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti; 3. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti; 4. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti; 5. Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial.

Target Pencapaian bidang sosial tahun 2021 adalah 100%. Dari target tersebut telah terealisasi 100%.



Pelatihan Bagi Anak Rentan Hidup di Jalan, Penyerahan Bantuan Makanan Kepada Pasien Isolman

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada pelaksanaan EPPD tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari Kemendagri berupa Piagam Penghargaan yang Diterima Kota Yogyakarta Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Skor 3,4581 dan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.



Terkait indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi DIY. Dengan torehan ini, menandakan Pemkot Yogyakarta telah mendapatkan predikat opini WTP untuk yang ke-13 kalinya secara beruntun, dan terbanyak di DIY.



Keterangan: Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istiwame Yogyakarta, Jariyatna, SE, MM, CPA, CSPAK, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkot Yogyakarta kepada Wakil Walikota Yogyakarta, Drs, Heroe Poerwadi, MA.

VI. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berikut adalah penjabaran realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021:

Table with 4 columns: URAIAN, ANGGARAN (Rp), JUMLAH (Rp), and %. Rows include Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, and Pembiayaan Daerah.

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, Tahun 2021

VII. INOVASI DAERAH

Menurut PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bentuk Inovasi Daerah terdiri dari 3 yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, berjumlah 9 inovasi (9,8 %).
Inovasi pelayanan publik, berjumlah 57 inovasi (62 %).
Inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berjumlah 26 inovasi (28,2 %).
Sedangkan berdasarkan Inisiator, terbagi menjadi:
Inisiasi Kepala Daerah, sejumlah 5 inovasi (5,4%)
Inisiasi OPD, sejumlah 42 inovasi (45,7 %)
Inisiasi ASN, sejumlah 43 inovasi (46,7 %)
Inisiasi masyarakat, sejumlah 2 inovasi (2,2 %)



Pada tahun 2021, Kota Yogyakarta memperoleh Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021 dengan Kategori Kota Terinovatif yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 29 Desember 2021.



Kota Yogyakarta juga meraih penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementreian Penyelenggaraan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.



VIII. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2021 telah kami sampaikan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap stakeholder dan seluruh warga Kota Yogyakarta atas segala masukan, saran, dukungan dan kerjasamanya yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk atas segala doa dan upaya kita bersama dalam mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi lebih baik.

Sekian dan terima kasih.
Wabillahitauquf Walhidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

